

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sebelum penulis mengadakan penelitian Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil kajian antara lain:

1. Umi Hanifah (03104038), *"Implementasi Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama Untuk Mencapai Standar Kompetensi Kelulusan (Studi Di Madrasah Tsanawiyah-Aliyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro)"* Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, kurikulum muatan lokal berbasis agama di MTs - Aliyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro menggunakan kurikulum kombinasi yaitu dari Departemen Agama, Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum *Kulliyatul Mu'alimin Islamiyah* (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo serta kurikulum ala pesantren salaf.<sup>1</sup>
2. Alhidayah (03101077), *"Studi Tentang Pengembangan Kurikulum PAI Muatan Lokal di Madrasah Aliyah Al Khoiriyyah Semarang"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Madrasah Aliyah Al Khoiriyyah Semarang telah mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islamnya melalui celah muatan lokal sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah dengan merencanakan kurikulum PAI muatan lokal dan diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran baik berupa mata pelajaran atau berupa kegiatan-kegiatan di luar kelas. Hasil pengembangannya berupa nahwu sharaf, muhadasah, hadits ahkam, khitobah, tahfidz, dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya berupa

---

<sup>1</sup>Umi Hanifah (03104038), *"Implementasi Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama Untuk Mencapai Standar Kompetensi Kelulusan (Studi Di Madrasah Tsanawiyah-Aliyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro)"*, Skripsi (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009).

ekstrakurikuler. kurikulum PAI muatan lokal siswa dapat menambah, memperluas pengetahuan dan keahlian tentang pendidikan agama Islam lebih mendalam bukan hanya sebatas dari bidang studi yang ada dalam kurikulum nasional, sehingga peserta didik dapat mengerti, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut maka madrasah mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya berpengetahuan tetapi juga berakhlakul karimah.<sup>2</sup>

Penulis mengangkat beberapa kajian di atas karena, skripsi pertama memaparkan tentang pelaksanaannya, kurikulum muatan lokal berbasis agama menggunakan kurikulum kombinasi yaitu dari Departemen Agama, Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Kurikulum *Kulliyatul Mu'alimin Islamiyah* (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo serta kurikulum ala pesantren salaf.

Kemudian pada skripsi yang kedua terkait dengan pengembangan dan perencanaan kurikulum muatan lokal agama islam dan diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran.

Dan dari tulisan-tulisan tersebut penulis belum menemukan suatu pembahasan pengembangan manajemen kurikulum muatan lokal agama islam lebih spesifik. Khususnya implementasinya di pendidikan dasar. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama di SD Nurul Islam Purwoyoso Semarang.

## **B. Kerangka Teoritik**

Dalam *Kamus Oxford* ditemukan kata *management* yang berarti *the act or skill of dealing with people or situations in successful way*.<sup>3</sup> artinya manajemen adalah tindakan atau keahlian dalam menghadapi orang-orang atau situasi secara sukses. Maksud/arti manajemen di sini adalah manajemen ditinjau dari sudut

---

<sup>2</sup>Alhidayah (03101077), "*Studi Tentang Pengembangan Kurikulum PAI Muatan Lokal di Madrasah Aliyah Al Khoiriyyah Semarang*", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2006)

<sup>3</sup>Sally Wahmeier (ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 2000), hlm. 778.

*proses pencapaian tujuan pendidikan.* Manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya personal dan sumber daya yang lain.<sup>4</sup>

Henry L Silk dalam bukunya *Principle of Manajemen* menjelaskan bahwa *management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stated objectives.*<sup>5</sup> Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.<sup>6</sup> Manajemen juga diartikan sebagai suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengeturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Saylor, Alexander dan Lewis (1974) kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik didalam ruangan kelas maupun diluar sekolah. Sementara itu Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa

---

<sup>4</sup>Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. VII, hlm. 7.

<sup>5</sup>Henry L Silk, *Principles Of Management*, (New York: South Western Publishing Company, 1969), hlm.10.

<sup>6</sup>G.R Terry dan L.W Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 1.

<sup>7</sup>Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 16.

dibawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*).

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematis dan sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan keijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Diversifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penganekaragaman, penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan produk jasa atau investasi, secara horizontal diartikan usaha untuk mengganti atau menghasilkan hasil pertanian yang bersifat monokultur ke arah pertanian yang bersifat multikultur, dan secara vertikal diartikan usaha memajukan industri pengolahan hasil pertanian.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud diversifikasi muatan lokal agama disini adalah penganekaragaman/penggolongan bahan ajar Pendidikan Agama Islam yang tadinya global dikembangkan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian menjadi: Aqidah Akhlak, Bahasa Arab, BTA, Fiqih, Qur'an Hadits dan SKI.

Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. Dengan demikian kedudukan muatan lokal dalam kurikulum sekolah bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi bahan mata pelajaran yang terpadu, yaitu merupakan bagian mata pelajaran yang sudah ada.

---

<sup>8</sup>Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 3.

<sup>9</sup>Y. Zulkanaen, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), hlm. 119.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut:

- a) Produktivitas, hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik mencapai hasil belajar sesuai tujuan kurikulum.
- b) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- c) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d) Efektivitas dan efisiensi, sehingga kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
- e) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.<sup>10</sup>

Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi-fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen, selain itu istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut kiranya disebabkan oleh latar belakang kehidupan, kondisi lembaga atau organisasi dimana para tokoh bekerja, filsafat hidup, dan pesatnya dinamika kehidupan yang mengiringinya, seperti cepatnya kemajuan informasi, teknologi dan media. Namun demikian secara umum perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian pergerakan, dan pengawasan.

---

<sup>10</sup>Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 4-5.

Seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengendalian. Sedangkan G.R. Terry menyatakan empat fungsi manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengendalian, atau yang sering kita kenal dengan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*).<sup>11</sup>

Adapun tujuan manajemen menurut Shrode Dan Voich (1974) tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasan.<sup>12</sup> Mungkin saja tujuan ini tidaklah tunggal bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya,, pemenuhan kesempatan kerja, pembangunan daerah/nasional, tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Perkembangan studi manajemen tidak semata-mata terpusat pada pencapaian tujuan organisasi saja, tetapi telah berkembang meliputi mental, moral, dan etika yang berkaitan dengan pencapaian tujuan.

## **1. Dasar-dasar Manajemen Pengembangan Manajemen Kurikulum**

### **a. Dasar Yuridis/Hukum**

- 1) PP no. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 3: "Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien."<sup>13</sup>
- 2) PP no. 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 1: "Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI, SD LB/MI LB, SMP/MTS, SMP LB/MTS LB, SMA/MA, SMA LB/MA LB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat

---

<sup>11</sup>Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 19.

<sup>12</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 15.

<sup>13</sup>PP RI No 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2005), hlm. 13.

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.<sup>14</sup>

- 3) PP no.19 tahun 2005 pasal 6 ayat 2: "Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal, terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan."<sup>15</sup>
- 4) UU no.20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2: "Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik."<sup>16</sup>
- 5) UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat (1) sampai (5) yang berbunyi:
  - a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
  - c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
  - d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain.
  - e) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>PP RI No 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2005), hlm. 12.

<sup>15</sup>PP RI No 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2005), hlm. 6.

<sup>16</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 28.

<sup>17</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 24.

b. Dasar Religius

Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan, kaitanya dalam hal ini adalah muatan lokal agama sebab dengan dasar ini maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Konstruksi agama membutuhkan aktualisasi dalam berbagai dasar pendidikan yang lain, seperti historis, sosiologis, politik, dan administratif, ekonomi psikologis dan filosofis. Agama menjadi *frame* bagi semua dasar pendidikan islam. Aplikasi dasar-daar lain merupakan bentuk realisasi diri yang bersumberkan dari agama dan bukan sebaliknya. Apabila pendidikan dasar menjadi *frame* bagi dasar pendidikan islam, maka semua tindakan kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah merupakan aktualisasi diri (*self-actualization*) yang paling ideal dalam pendidikan islam.<sup>18</sup>

Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama yang diturunkan pada rasulullah SAW oleh karena belajar itu adalah kewajiban utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat.<sup>19</sup> perintah belajar tersebut tidak terbatas pada urusan duniawi saja, tapi juga dalam urusan ukhrawi.

Firman allah SWT dalam al-quran surat at-Taubah ayat 122:



“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila

<sup>18</sup>Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 47.

<sup>19</sup>M. Athiyah Al-abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustani A. Gani dan Djohar L.I.S, (Jakarta: Karindo, 2004), hlm. 277



mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S Taubah: 122)<sup>20</sup>

Lafadz “*liyatafaqqahuu fidiin*” dalam ayat tersebut memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama.<sup>21</sup> Seorang muslim perlu mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada orang lain berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka, sehingga memberikan pengetahuan hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang beriman.

Selain ayat di atas juga disebutkan dalam hadits

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَأْمِنٌ مَوْلُودًا لِأَبِيهِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ  
(رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairoh R.A. berkata : Rasul SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa fitroh beragama (perasaan percaya kepada Allah) Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi (HR. Muslim).

Jadi belajar agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim sebagai benteng yang dapat menjaga diri dan tetap dalam koridor yang disyariatka. Begitu pentingnya belajar agama

Di dalam GBPP PAI dijelaskan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam Asyafi'i, 2008), hlm. 229.

<sup>21</sup>Abudin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 159

<sup>22</sup>Muhaimin, et. al., *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.. 78.

Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam menurut Chabib Thoha yaitu, untuk mencapai hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya.<sup>23</sup>

## **2. Perencanaan Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama**

Perencanaan (*planning*) kurikulum sangat tergantung pada pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum yang akan menjadi penghubung teori-teori pendidikan yang digunakan. Menurut Oemar Hamalik perencanaan kurikulum adalah proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran dan unsure-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan.<sup>24</sup>

Menurut GR. Terry sebagaimana dikutip oleh Hasibuan, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>25</sup>

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama

---

<sup>23</sup>Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99.

<sup>24</sup>Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 21

<sup>25</sup>Malayu Hasibuan, *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Pertja, 1989), hlm. 95.

adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.

Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak saling mengarah pada tujuan yang diharapkan. Tahapan perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan.

Pada dasarnya pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila kebutuhan masyarakat di analisis, hal ini akan sangat membantu para penyusun kurikulum dalam merumuskan masalah masyarakat (*social problem*), yang berkaitan dalam pemilihan dan penyusunan bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman kurikuler.<sup>26</sup>

b. Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis.

Kurikulum berusaha mengerti persoalan-persoalan dalam pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap data-data. Dan berusaha mengerti dan menjawab segala persoalan pendidikan dan hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan.

Dasar filosofis Pendidikan Agama Islam dimaksudkan agar dalam menyusun rencana dan mengembangkan kurikulum hendaknya berpegang atau berlandaskan nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam hidup dan kehidupan seseorang dan masyarakat.

Nilai-nilai filosofis yang dimaksud bersumber pada ajaran agama Islam dan nilai-nilai budaya bangsa yang berkembang di masyarakat.<sup>27</sup>

c. Menentukan desain kurikulum

Desain kurikulum adalah rencana atau susunan dari unsure-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar dan evaluasi. Para

---

<sup>26</sup>Udi Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 236.

<sup>27</sup>Muslam, *Pengembangan Kurikulum PAI Teoritis dan Praktis*, (Semarang: Pusat Kerajinan dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman, 2004), Cet. III, hlm. 52.

pengembang kurikulum telah menginstruksikan kurikulum menurut dasar-dasar pengkategorian berikut: *Subject-centered design*: desain yang berpusat pada mata pelajaran, *Learner-centered design*: desain yang berpusat pada pembelajaran (siswa), *Problem-centered design*: desain yang berpusat pada permasalahan (masalah-masalah yang dihadapi masyarakat).<sup>28</sup>

- d. Membuat rencana induk (*master plan*): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian

Kurikulum dapat dilihat sebagai semua perencanaan pendidikan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan. Menunjukkan bahwa hal itu *berkaitan* dengan maksud utama pengembangan kurikulum, yaitu mengidentifikasi tujuantujuan yang lebih luas dan yang lebih khusus pengajaran yang harus di usahakan tercapai.

Dengan tujuan dan urutan kurikulum yang telah dikhususkan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Agar hasil kurikulum sesuai dengan tujuannya maka harus ada penilaian pada tiap tahap.<sup>29</sup>

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum didasarkan atas asas-asas yang dijadikan dasar pertimbangan, yakni:

- 1) Asas Filosofis.

Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang “baik”. Apakah yang dimaksud dengan “baik pada hakikatnya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut negara, tapi juga guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan, jadi juga bahan pelajaran yang disajikan, mungkin juga cara mengajar dan menilainya. Pendidikan di Negara otokratis akan berbeda dengan Negara yang demokratis, pendidikan yang di Negara yang menganut agama Budha akan berlainan dengan pendidikan di Negara yang memeluk agama islam atau Kristen. Kurikulum tak dapat tiada

---

<sup>28</sup>Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. III, hlm. 195.

<sup>29</sup>Udi Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 222.

mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat bangsa dan Negara terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal”.

## 2) Asas Psikologi

### a) Psikologi anak

Sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yaitu menciptakan situasi-situasi dimana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa karena itu mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya.

### b) Psikologi belajar

Pendidikan disekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik, dapat dipengaruhi kelakuannya. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dapat menguasai sejumlah ketrampilan. Soal yang penting ialah : bagaimana anak itu belajar? Kalau kita tahu betul, bagaimana proses belajar itu berlangsung, dalam keadaan yang bagaimana belajar itu memberikan hasil yang sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang seefektif-efektifnya.

## 3) Asas Sosiologis

Anak tidak hidup sendiri terisolasi dari manusia lainya, ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Disitu ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukanya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak, maupun sebagai orang dewasa kelak. Ia banyak menerima jasa dari masyarakat dan ia sebaliknya harus menyumbangkan buktinya bagi kemajuan masyarakat. Tuntutan masyarakat tak dapat diabaikanya.

Tiap masyarakat memiliki norma-norma, adat kebiasaan yang tak dapat tiada harus dikenaldan diwujudkan anak dalam pribadinya lalu dinyatakan dalam kelakuanya. Tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang dan kebudayaanya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Juga perkembangan masyarakat akibat

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan factor pertimbangan dalam kurikulum.

Oleh sebab masyarakat suatu faktor yang begitu penting dalam pengembangan kurikulum, maka masyarakat dijadikan dalam satu asas. Dalam hal inipun harus kita jaga, agar asas ini jangan terlampau mendominasi sehingga timbul kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau “society-centered curriculum”.

#### 4) Asas Organisatoris

Asas ini berkenaan dengan masalah, dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran akan disajikan? Apakah dalam bentuk pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk *broad-field*, atau bidang studi seperti IPA, IPS, Bahasa, dan lain-lain. ataukah diusahakan hubungan yang lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu.

Ilmu jiwa asosiasi yang berpendirian bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya cenderung memilih kurikulum yang *subject-centered*, atau yang berpusat pada mata pelajaran, yang dengan sendirinya akan terpisah-pisah. Sebaliknya ilmu jiwa Gestalt lebih mengutamakan keseluruhan, karena keseluruhan itu bermakna dan lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Aliran psikologi ini cenderung memilih kurikulum terpadu atau *integrated curriculum*.<sup>30</sup>

Di dalam mengembangkan kurikulum ada beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1) Prinsip Berorientasi pada Tujuan dan Kompetensi

Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Dalam pengertian kurikulum menurut UU. No 20 Tahun 2003 disebutkan “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

---

<sup>30</sup>S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Ed.2 Cet. IX. hlm. 11-14.

tertentu”. dengan demikian prinsip umum kurikulum yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan . tujuan pendidikan mempunyai tingkatan/hirarki tertentu, mulai dari tujuan yang sangat umum sampai dengantujuan yang sangat khusus (spesifik). Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus (behavioral objective). Tujuan pendidikan harus mencakup semua perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik.<sup>31</sup>

## 2) Prinsip Relevansi

Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Dengan kata lain pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari hasil pendidikan itu berguna atau fungsional bagi kehidupan.

Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat kita tinjau sekurang-kurangnya dari tiga segi :

- a) Relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup murid.
- b) Relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang.
- c) Relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan.<sup>32</sup>

## 3) Prinsip Efisiensi

Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dan usaha yang telah dikeluarkan (input). Bila hasil yang kita capai nilainya Rp. 800,- sedangkan usaha yang kita keluarkan bernilai Rp. 1.000,- maka usaha kita tersebut tidak efisien.<sup>33</sup>

Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum tentu sulit digunakan bila dibandingkan dengan produk suatu perusahaan atau mesin. Meskipun demikian

---

<sup>31</sup>Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 31.

<sup>32</sup>Hendyat Soetopo dan Wasti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 49-50.

<sup>33</sup>Hendyat Soetopo dan Wasti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 58.

prinsip ini perlu dipertimbangkan terutama yang menyangkut tentang waktu, tenaga, peralatan, dan dana. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan, sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Para pengembang kurikulum harus memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi tempat dimana kurikulum itu akan digunakan. Pengetahuan tentang tempat ini akan memandu pengembang kurikulum untuk memenuhi prinsip praktis, yang memungkinkan untuk diterapkan. Salah satu kriteria praktis itu adalah efisien, maksudnya tidak mahal alias murah, tetapi bukan berarti murahan. Hal ini mengingat sumber daya pendidikan, seperti, tenaga, dana, fasilitas, terutama di daerah sangat terbatas, kurikulum harus dikembangkan secara efisien, tidak boros sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat kemampuan diberbagai daerah dan sekolah penyelenggara pendidikan serta hasil belajar peserta didik. Implikasinya adalah mengusahakan kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan kurikuler itu memadai dan memenuhi harapan.<sup>34</sup>

#### 4) Prinsip Efektifitas

Efektifitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Bila ada 10 jenis kegiatan yang direncanakan, dan tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektifitas kegiatan kita belum memadai. Demikian pula bila ada 10 tujuan yang kita inginkan dan ternyata 5 yang tercapai, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut masih dipandang kurang efektif.

Di dalam bidang pendidikan, efektifitas ini dapat kita tinjau dari dua segi yaitu, efektifitas mengajar guru, dan efektifitas belajar murid.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 32-33.

<sup>35</sup> Hendyat Soetopo dan Wasti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 50.



5) Prinsip Integritas

Kurikulum dikembangkan berdasarkan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna atau terstruktur. Bermakna maksudnya adalah suatu keseluruhan itu memiliki arti, nilai, manfaat, atau faedah tertentu. Keseluruhan bukan merupakan penjumlahan dari bagian-bagian, melainkan suatu totalitas yang memiliki maknanya sendiri. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap bagian yang ada dalam keseluruhan berada dan berfungsi dalam struktur tertentu. Pendidikan anak adalah pendidikan yang seutuhnya, pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang terpadu. Implikasinya adalah para pengembang kurikulum harus memperhatikan dan mengusahakan agar pendidikan dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dan manusia seutuhnya. Peserta didik memiliki potensi yang dapat tumbuh dan berkembang.

6) Prinsip Kontinuitas

Kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan, baik sinambung antara mata pelajaran, antar kelas, maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa dapat maju secara sistematis, dimana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Dengan demikian akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasarat awal siswa (prerequisite) untuk mengikuti pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga terhindar dari adanya pengulangan-pengulangan program dan aktifitas belajar yang tidak perlu yang bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga dan dana. Untuk itu, perlu adanya kerjasama diantara pengembang kurikulum dari berbagai kelas dan jenjang pendidikan. Implikasinya adalah mengusahakan kegiatan kurikuler lainnya, baik secara vertikal (bertahap, berjenjang) maupun secara horizontal.<sup>36</sup>

7) Prinsip Pendidikan Seumur Hidup

Prinsip ini mengandung implikasi bahwa sekolah tidak hanya memberi pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat sementara, hanya sampai peserta

---

<sup>36</sup>Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 34-35.

didik tamat dari sekolah, namun juga memberikan bekal kemampuan agar dapat menumbuhkembangkan dirinya sendiri dalam masyarakat luas terus menerus sepanjang hayatnya.<sup>37</sup>

### **3. Pelaksanaan Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama**

Penempatan fungsi pengorganisasian (*organizing*) setelah perencanaan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Suatu perencanaan yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya mendekati pada tujuan yang hendak dicapai untuk merealisasikan suatu rencana ke arah tujuan memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah di mana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pengajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai social, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa factor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan (*integrated*).<sup>38</sup>

Jenis-jenis pengorganisasian kurikulum, meliputi:

a. Mata pelajaran yang pisah-pisah (*Separated Subject Curriculum*)

Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran (*subjects*) yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain.

---

<sup>37</sup>Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1992), hlm. 55.

<sup>38</sup>Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 60.

b. Mata pelajaran gabungan (*Correlated Curriculum*)

Pada dasarnya kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lainnya ada hubungan, bersangkutan paut (*correlated*) walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan.

c. Mata pelajaran gabungan (*Integrated Curriculum*)

Istilah ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya.

Pengorganisasian Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yakni membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang di inginkan dan menilai bagaimana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada siswa.<sup>39</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari pengembang kurikulum adalah agar siswa mengalami perubahan sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks, dan melibatkan berbagai komponen, yang tidak hanya menuntut ketrampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi ini, tentu saja diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan lain-lain.

Dengan demikian implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil

---

<sup>39</sup>Akhmad Sudrajat, "Pengembangan Kurikulum", dalam [http://www.uny.co.id/akademik/sharefile/files/270920077164614\\_PengembanganKurikulum.doc](http://www.uny.co.id/akademik/sharefile/files/270920077164614_PengembanganKurikulum.doc), diakses 11 Oktober 2012.

senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional dan fisiknya.<sup>40</sup>

1) Ketenagaan dalam pengembangan Kurikulum

Ketenagaan dalam pengembangan kurikulum atau *Staffing* adalah fungsi yang menyediakan orang-orang untuk melaksanakan dan diorganisasikan. Fungsi ini mensuplai sumber daya manusia untuk melaksanakan misi dan memvitalisasikan departemen/kelembagaan

2) Isi (materi)

Komponen isi berupa materi yang di programkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi tersebut biasanya berupa materi-materi bidang studi.<sup>41</sup>

Materi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian/topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran.
- b) Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan.
- c) Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui penyampaian materi kurikulum.<sup>42</sup>

3) Strategi belajar-mengajar.

Strategi atau metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru.

---

<sup>40</sup>Udi Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 238.

<sup>41</sup>Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1992), hlm. 5.

<sup>42</sup>Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. III, hlm. 25.

Ada 3 alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yakni:

- a) Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, di mana materi pembelajaran terutama bersumber dari mata ajaran. Penyampaiannya dilakukan melalui komunikasi antar guru dan siswa. Guru sebagai penyampai pesan. Siswa sebagai penerima pesan. Bahan pelajaran adalah pesan itu sendiri. Dalam rangkaian komunikasi tersebut dapat digunakan berbagai metode mengajar.
  - b) Pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat dan kemampuan siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan metode dalam rangka individualisasi pembelajaran. Seperti belajar mandiri, belajar modulan, paket belajar, dan sebagainya.
  - c) Pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan terdiri dari : karya wisata, nara sumber, kerja pengalaman, survei, pengabdian masyarakat, berkemah, dan sebagainya.<sup>43</sup>
- 4) Media mengajar

Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Perumusan di atas menggambarkan pengertian media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang belajar yang sering disebut sebagai audio visual, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar, berupa alat-alat elektronika seperti mesin pengajaran, film, *audio cassette*, *video cassette*, televisi, dan rekaman suara.

---

<sup>43</sup>Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. III, hlm. 27.

#### **4. Evaluasi Manajemen Pengembangan Kurikulum Diversifikasi Muatan Lokal Agama**

Pengarahan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkungannya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Penggerakan dalam lembaga pendidikan terkait langsung dengan perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan dan komunikasi.

Guru sebagai seorang pemimpin dalam proses belajar mengajar berusaha untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik, apakah itu berupa intrinsik atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu peserta didik dapat mengetahui apa arti ilmu pengetahuan bagi mereka untuk menatap hari esok yang lebih baik. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu peserta didik dapat mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuannya nanti dengan sebaik-baiknya.

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan aktivitas untuk melihat segala kegiatan yang dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan rencana yang digariskan. Fungsi ini juga merupakan hal yang penting untuk menentukan rencana yang akan datang. Tanpa pengawasan tidak akan diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu.

Kalau dikaitkan dengan pengajaran, mengawasi yaitu menentukan keberhasilan dalam mengorganisasikan dan memimpin dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.<sup>44</sup>

Pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan setiap tugas pemimpin, termasuk dalam pengelolaan pengajaran. Program pengajaran yang telah direncanakan sedemikian rupa yang akan dilaksanakan oleh guru dalam pengajaran, agar diadakan kontrol, seberapa jauh kemampuan daya serap para peserta didik, apa yang telah disampaikan oleh guru.

Guru dalam proses belajar mengajar harus dapat mengetahui apakah materi bahan pengajaran yang telah disampaikan, sudah dipahami atau belum. Jika belum dipahami, bagian mana yang belum dipahami. Karena itu seorang guru

---

<sup>44</sup>Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti (Eds), *PBM PAI DI SEKOLAH : Eksistensi dan proses belajar mengajar PAI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 186.

dalam proses belajar mengajar harus mengadakan analisa kemampuan mengajar guru, sebagai bahan kontrol atau pengawasan dalam pengajaran.<sup>45</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan pengawasan kurikulum dalam hal ini adalah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar, sehubungan dengan hal itu tugas utama guru adalah:

- a. Menyusun soal
- b. Mengawasi evaluasi
- c. Memeriksa soal, dan
- d. Membuat dokumentasi dalam buku nilai (daftar nilai).<sup>46</sup>

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.<sup>47</sup>

Di sini penulis akan menyetengahkan tentang pengawasan/pengendalian pelaksanaan kurikulum (Pengawasan proses pembelajaran) muatan lokal agama tentang evaluasi dan pelaporan.

#### 1) Evaluasi (*evaluating*)

Evaluasi diri merupakan bagian dari proses peningkatan mutu kinerja sekolah atau pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Evaluasi diri selama 1 (satu) semester/6 bulan sekali. Data pencapaian kompetensi disusun menjadi profil prestasi peserta yang digunakan sebagai dasar penyusunan program layanan atau pembinaan secara periodik oleh madrasah/sekolah maupun secara insidental oleh konselor atau wali kelas madrasah/sekolah, termasuk bimbingan belajar, bimbingan karier, dan konseling pribadi. Evaluasi

---

<sup>45</sup>Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti (Eds), *PBM PAI DI SEKOLAH : Eksistensi dan proses belajar mengajar PAI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 190.

<sup>46</sup>Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti (Eds), *PBM PAI DI SEKOLAH : Eksistensi dan proses belajar mengajar PAI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 54.

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 23, hlm. 75.

diri harus memperhatikan karakteristik, tujuan, manfaat dan sasaran evaluasi diri.<sup>48</sup>

a) Evaluasi hasil belajar

Untuk menetapkan berhasil tidaknya peserta didik mencapai tujuan pengajaran diperlukan tindakan evaluasi, dengan evaluasi tersebut dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh peserta didik adalah bentuk hasil belajar yang dicapainya dan dapat memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar.<sup>49</sup> Evaluasi hasil belajar dapat dilakkan melalui dua tahap, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

- (1) Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir program belajar mengajar, dan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bukan untuk menentukan angka kemajuan belajar siswa, akan tetapi hasil tersebut digunakan untuk memperbaiki tindakan mengajarnya. Apabila hasilnya masih kurang, guru berkewajiban mengulang bahan pelajaran tersebut sebelum mengajarkan bahan lainnya.
- (2) Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir program, misalnya akhir catur wulan atau akhir semester. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan angka kemajuan peserta didik dan hasilnya digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik, kenaikan kelas dan untuk laporan kepada orang tua mengenai kemajuan belajar anaknya di sekolah yang dituangkan dalam buku raport.

---

<sup>48</sup>Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. I, hlm. 166-168.

<sup>49</sup>Nana Sudjana, *Pembinaan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 47-48.



b) Evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum bisa dilakukan terhadap beberapa hal diantaranya: *input*, proses, *out put* dan dampak.<sup>50</sup>

1. Input

Evaluasi terhadap input kurikulum mencakup evaluasi semua sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan. Seperti dana, sarana, tenaga, konteks sosial dan penilaian terhadap peserta didik sebelum menempuh program.

2. Proses

Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum, meliputi penilaian proses belajar mengajar, bimbingan konseling, administrasi dan supervisi, sarana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.

3. Output

Evaluasi output adalah penilaian terhadap lulusan pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan program yang ditempuhnya.

4. Dampak

Evaluasi dampak kurikulum adalah penilaian terhadap kemampuan lulusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan profesi yang dimiliki, atau penilaian terhadap kompetensi lulusan dari sudut pribadi, profesi dan sebagai anggota masyarakat.

2) Pelaporan

Pelaporan mencakup laporan wali kelas, kepala kepala sekolah. dan guru-guru yang tergolong dalam mata pelajaran diversifikasi muatan lokal agama. Laporan guru muatan lokal agama disampaikan kepada wali kelas. Guru bisa melengkapi laporannya dengan informasi tentang hambatan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, dan atau kegagalan yang terjadi karena adanya

---

<sup>50</sup>Nana Sudjana, *Pembinaan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 47.

hambatan yang tidak bisa diatasi. Informasi tersebut merupakan bahan laporan wali kelas kepada kepala sekolah dan sebagai bahan menyusun program kerja tahun berikutnya.

Laporan wali kelas memuat prestasi (pencapaian kompetensi) dari kelas binaannya untuk disampaikan kepada orang tua peserta didik dan peserta didik yang bersangkutan. Wali kelas juga membuat laporan tentang profil kompetensi peserta didik dan pembinaan yang pernah dilakukan atau kasus yang terjadi dari kelas binaannya untuk disampaikan kepada kepala sekolah. Laporan tersebut sebagai bahan kepala sekolah membuat laporan sekolah.

Laporan kepala sekolah memuat hasil evaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan, profil kompetensi peserta didik di sekolah yang dipimpinnya, serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan kepala sekolah dikirim kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota/provinsi sebagai bahan membuat profil pencapaian kompetensi peserta didik dan peta sekolah di daerah kabupaten tersebut. Laporan kinerja sekolah secara keseluruhan, yang diharapkan dalam pedoman ini, lebih menekankan pada laporan akuntabilitas,<sup>51</sup> yaitu laporan pertanggungjawaban berdasarkan kebenaran esensial dan faktual di samping berdasarkan dokumen tertulis. Laporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi diri, akreditasi, dan hasil analisis faktual. Sebagai contoh, laporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi tentang kesesuaian masukan (program) dengan harapan masyarakat, kesesuaian proses dengan program, dan pencapaian kompetensi lulusan yang diakui oleh pihak luar. Lembaga administrasi Negara telah mengembangkan pola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), namun sampai saat ini belum ada pola khusus laporan akuntabilitas lembaga pendidikan.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dirancang dan dilaksanakan dalam rangka manajemen berbasis sekolah (desentralisasi pendidikan). Dalam suasana ini peran serta masyarakat di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan dana saja melainkan juga dalam aspek akademik. Unsur utama

---

<sup>51</sup>Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 78 (a), dan Pasal 79 (1-3.), hlm. 94.

dalam manajemen berbasis sekolah adalah pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Atas dasar itulah laporan kemajuan belajar siswa harus dibuat sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada siswa, orang tua atau wali, masyarakat, atasan, dan instansi terkait lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, *Penilaian Berbasis Kelas KBK SKI-MI*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 33.